

## Teh Kopi: Selangkah Menuju Adminduk Tuntas di Desa



*Teh Kopi membantu Kecamatan Gucialit memaksimalkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau PATEN untuk mengurus dokumen kependudukan*

Jam 9 pagi, ruang tunggu pelayanan di Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terlihat sepi. Kursi tunggu berwarna hitam berjajar dengan rapi. Belum terlihat antrian masyarakat yang mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk). Hanya terlihat Liana (17 tahun), yang sedang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) pertamanya, ditemani sang kakak ipar. Liana baru saja selesai melakukan pengambilan sidik jari dan foto identitas. Dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau PATEN, semua urusan kependudukan sudah bisa diselesaikan di kecamatan. Tetapi, mengapa ruangan layanan bisa sepi sekali?

Ya, sejak September 2021, sebagian besar layanan adminduk sudah bisa “diselesaikan” di desa-desa di wilayah Gucialit dengan dukungan Teknologi Komunikasi Pelayanan Internal, atau lebih dikenal dengan *Teh Kopi*. *Teh Kopi* sebenarnya adalah *Whatsapp Group* (WAG) di Kecamatan Gucialit berkaitan dengan urusan layanan adminduk. Anggotanya adalah staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Lumajang, staf kecamatan, dan perangkat desa di Kecamatan Gucialit. Selain menjadi media komunikasi internal, WAG ini juga digunakan untuk percepatan urusan adminduk seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) atau akta kelahiran maupun akta kematian.

Dengan *Teh Kopi*, warga dari desa-desa di wilayah Kecamatan Gucialit tidak perlu lagi datang atau mengantri di kecamatan jika ingin mengurus dokumen adminduk seperti disebutkan di atas. Mereka hanya cukup datang ke kantor desa dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Operator yang biasanya dilakukan oleh Kasie Pelayanan di desa akan mengirimkan *soft copy* persyaratan ke kecamatan lewat WAG *Teh Kopi*.

Proses melalui *Teh Kopi* ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2019, sebelum desa-desa bisa mencetak dokumen adminduk sendiri. Kala itu, warga masih tetap perlu datang ke kantor kecamatan dengan membawa berkas asli untuk mendapatkan dokumen adminduk. Baru sejak September tahun lalu,

warga sudah tidak perlu ke kantor kecamatan lagi, karena dokumen adminduk asli sudah bisa dicetak di kantor desa. “Warga tunggu di rumah. Dokumen selesai, ambil di desa. Atau diantar oleh RT/RW (ke rumah),” ujar Lukman, Sekretaris Desa Wonokerto.

Menurut Lukman, inovasi ini cukup menguntungkan bagi warga desanya. Memang, jarak dari Wonokerto ke kantor kecamatan tidak terlalu jauh hanya 7 km, dan bisa ditempuh dalam waktu 20 menit. Tetapi medan jalan di Kecamatan Gucialit yang bergunung-gunung, dengan beberapa ruas jalan masih berbatu, rawan terjadi banjir, dan tanah longsor. Hal lain yang tak kalah penting, tambah Lukman, warga desanya tidak perlu meninggalkan pekerjaan mereka untuk bisa mendapatkan dokumen kependudukan. “Mereka bisa kembali bekerja di ladang atau sawah lagi.” Mengingat, mayoritas warga desa Wonokerto bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. “Mereka cukup datang ke kantor desa.”

Bagi Desa Gucialit, dengan jarak ke kantor kecamatan sekitar 400 meter, manfaat tidaklah terlalu signifikan. “Tapi para lansia sangatlah diuntungkan. Mereka tidak perlu antri di kecamatan,” jelas Fitri Arista Dewi, Sekretaris Desa Gucialit. Terlebih, dalam situasi pandemik COVID-19 seperti sekarang ini, inovasi ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi kerumunan atau antrian dari warga yang butuh mengurus dokumen Adminduk.

### Dukungan Kecamatan untuk Jangkauan Pelayanan Adminduk Desa



*Seorang warga mengurus dokumen kependudukannya di Kantor Desa Gucialit*

Tak hanya di Lumajang, akses terhadap layanan adminduk masih merupakan permasalahan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat di perdesaan terutama kelompok masyarakat yang tergolong rentan seperti keluarga miskin, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, buruh migran dan kelompok rentan lainnya. Hal ini yang kemudian mendorong KOMPAK Bersama dengan mitra kerja lainnya melaksanakan Program Desa Tuntas Administrasi Kependudukan melalui Fasilitasi Pelaksanaan

Layanan Kependudukan di Desa (FPLKD) di tahun 2021. FPLKD bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan melalui kolaborasi inovasi jemput bola yang sudah ada, dengan menjangkau kelompok miskin, marginal dan disabilitas.

Program ini salah satunya dilakukan dengan memperkuat peran Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD. PTPD merupakan tim kecamatan yang bertugas mendampingi desa dalam rangka peningkatan kapasitas desa sebagai bagian dari tugas kecamatan untuk melakukan Binwas Desa. Selain membantu desa dalam perencanaan dan penganggaran, PTPD juga melakukan Binwas Desa terkait penyelenggaraan layanan adminduk di desa. Ahmad Hanum, Kasie Penataan Desa DPMD Lumajang mengenang, kala itu pihaknya bersama KOMPAK melakukan berbagai upaya untuk memperkuat peran kecamatan melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu.

Mulai dari membantu menyiapkan Peraturan Bupati No 93 tahun 2020 tentang PKAD Terpadu, yang memastikan desa mengalokasikan 1% Dana Desa mereka untuk kegiatan PKAD Terpadu, kemudian melatih fasilitator belajar di tingkat kecamatan dan kabupaten yang utamanya PTPD. "Kecamatan diperkuat karena muaranya adalah perangkat desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri, terjadi efektifitas dan efisien yang luar biasa dari sisi jarak, waktu, biaya dan lain sebagainya. Kehadiran KOMPAK menyelesaikan berbagai persoalan diluar kapasitas kami misalnya masalah koordinasi dan memberikan fokus pada intervensi-intervensi program yang cukup baik,"

Melalui PKAD Terpadu, Harmito, Kasie Perencanaan dan Evaluasi Desa DPMD Lumajang menyebutkan, PTPD di seluruh kecamatan di Lumajang telah berevolusi sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing dalam melaksanakan Binwas Desa. Ia mencontohkan Kecamatan Gucialit yang memiliki inovasi *Teh Kopi* guna efisiensi pelayanan. "Gucialit merupakan daerah pegunungan, dimana dari kantor kecamatan hingga titik desa yang paling jauh itu jaraknya 23 kilometer. Dengan adanya *Teh Kopi* ini pelayanan bisa lebih efisien," sebutnya.

Senada dengan Harmito, Budi Prasetya, Kasie Pelayanan Kecamatan Gucialit yang juga merupakan tim PTPD menjelaskan, karena wilayah Gucialit yang luas, maka tugas tim PTPD dibagi per kluster yaitu utara yang mendampingi 5 desa dan selatan yang mendampingi 4 desa. "Tiap satu bulan sekali tim kita anjingsana turun ke lapangan. Kita punya Bilik Pintar, tempat saling belajar tidak hanya terkait perencanaan dan keuangan desa, tapi juga pelayanan adminduk ini," sebutnya.

Secara bertahap, satu persatu desa di Gucialit menurut Budi sudah bisa memberikan pelayanan adminduk bagi warga mereka. Sejak September 2021 itulah, FPLKD sudah ada di semua desa di Gucialit yang melayani pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Namun untuk KTP, tambahnya, hanya bisa dilayani di kecamatan mengingat KTP memerlukan blanko khusus. Juga, perlu dilakukan rekam sidik jari dan retina mata dengan peralatan yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) termasuk pengambilan foto "Untuk dokumen kependudukan yang hanya dicetak di dengan kertas HVS 80 gram, itu bisa di kantor desa. Kalau KTP harus ke kecamatan," ujar Budi sembari menambahkan bahwa semua proses pelayanan adminduk di wilayah Gucialit adalah gratis.

Meskipun harus ke kecamatan, ini masih lebih menguntungkan jika dibandingkan warga harus pergi ke kantor Dinkes di pusat kota Lumajang. Annisa, warga Desa Tunjung bercerita, ketika dia mengurus KTP beberapa tahun yang lalu, dibutuhkan sekitar 6 hari kerja untuk mendapatkannya.

Itupun dengan antrian panjang. Dari desanya dibutuhkan waktu sekitar satu jam untuk sampai di pusat kota Lumajang. Jika dokumen diurus di kantor kecamatan, waktu perjalanan yang dibutuhkan hanya separuhnya saja. Begitu juga dengan bahan bakar motor (BBM) yang dibutuhkan. “Jika ke kantor Dispenduk bisa habis 2 liter, ke kantor kecamatan hanya perlu 1 liter. Saat ini, pengurusan adminduk jauh lebih sederhana, gratis, dan tidak ada lagi calo,” ujar Annisa

Proses penyelesaian dokumen adminduk bisa dicetak di kantor desa ini cukup sederhana. Pertama, operator di desa (biasanya Kasie Pelayanan atau Pemerintahan), akan mengirim syarat-syarat yang dibutuhkan ke *Teh Kopi*. Petugas di kecamatan akan meneruskan ke Dispenducapil di Lumajang untuk mendapatkan *barcode* dokumen tersebut. Setelah selesai, dokumen disimpan dalam bentuk PDF, dan dikirimkan kembali di *WAG Teh Kopi*. Kemudian, dicetak di desa.

Menurut Happy Saputra, salah satu staf Dispenduk di Kecamatan Gucialit, dokumen adminduk bisa selesai dalam satu hari. Tetapi lama waktu proses tergantung pada antrian dokumen yang masuk. Saat ini, tugas pelayanan di Kecamatan Gucialit, selain Kasie Pelayanan, juga didukung oleh dua staf kecamatan, dan dua petugas dari Dispenducapil yang ditugaskan untuk mendukung program adminduk tuntas di kecamatan.

Perlahan dan pasti, Lumajang terus meningkatkan cakupan layanan adminduk mereka dengan berbagai inovasi. Jika di tahun 2019 data Susenas menunjukkan cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di wilayah ini baru mencapai 74,45% sedangkan target nasional sebesar 85%. Di tahun 2021 angkanya 90,09%. Melalui penguatan peran PTPD di tiap kecamatan, sebanyak 63 desa telah menyediakan FPLKD yang memastikan semua warga, tanpa terkecuali, dapat dengan mudah dan cepat menjangkau layanan administrasi kependudukan tanpa dipungut biaya.

\*\*\*